



**DESENTRALISASI SEBAGAI SUATU SOLUSI KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK
MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL : SUATU TINJAUAN**

Oleh
Rahmat Salam
Universitas Muhamadiyah Jakarta
Email: rahmat.salam@umj.ac.id

Abstrak

Kebijakan Desentralisasi telah menjadi hal yang populer diantara negara-negara dunia pada dua dekade terakhir ini. Keragaman dalam derajat desentralisasi di seluruh dunia adalah fakta, namun tidak ada konsensus dalam literatur empiris mengenai pertanyaan seperti 'negara mana yang lebih terdesentralisasi?' Ini karena desentralisasi didefinisikan dan diukur secara berbeda dalam studi yang berbeda. Faktanya, penilaian yang benar tentang tingkat desentralisasi di suatu negara hanya dapat dilakukan jika pendekatan yang komprehensif diadopsi dan daripada mencoba untuk menyederhanakan sindrom karakteristik ke dalam dimensi tunggal otonomi, keterkaitan dari berbagai dimensi desentralisasi dimasukkan ke dalam Akun. Jadi, harus disadari bahwa tidak ada indeks satu dimensi yang dapat diukur yang sederhana dari derajat desentralisasi di suatu negara. Karena terdapat keragaman yang luas dalam studi tentang tingkat desentralisasi, begitu pula dengan literatur tentang hasil desentralisasi. Hasilnya bervariasi tidak hanya karena desentralisasi dapat muncul dalam berbagai bentuk dan kombinasi di berbagai negara tetapi juga karena instrumen yang berbeda mungkin memiliki pengaruh yang sangat berbeda dalam keadaan yang berbeda. Jadi, mencapai definisi yang tepat dari desentralisasi dan mengaitkannya dengan hasil tertentu tidak mungkin atau tidak diinginkan karena alasan sederhana bahwa generalisasi dalam bentuk apa pun dapat menciptakan perangkat yang dapat mengaburkan daripada mengklarifikasi fakta. Yang lebih penting adalah perlunya pendekatan yang benar-benar kontekstual namun komprehensif sementara melampaui langkah-langkah tumpul seperti desentralisasi pengeluaran dan juga mempertimbangkan pengaturan politik dan kelembagaan dari kasus spesifik yang sedang diselidiki.

Kata Kunci : Desentralisasi, Fiskal, Derajat & Devolusi

PENDAHUALUAN

Pertanyaan tentang derajat dan desain desentralisasi menjadi semakin penting karena ada kecenderungan yang semakin meningkat ke arah desentralisasi yang semakin banyak di seluruh dunia. Baik negara federal maupun negara kesatuan, baik negara industri maupun negara berkembang bergerak ke arah desentralisasi (Adi, 2005). Meskipun desentralisasi telah menjadi prioritas kebijakan yang paling disukai di antara para pembuat kebijakan, namun negara-negara di seluruh dunia berbeda secara dramatis dalam tingkat dan tingkat desentralisasi yang diperbolehkan dan diakomodasi. Maka timbul pertanyaan, bagaimana mengukur desentralisasi agar perbedaan derajat desentralisasi dapat

dikuantifikasi. Tetapi terlihat bahwa studi yang berbeda menghasilkan kesimpulan yang berbeda mengenai perkiraan komparatif derajat desentralisasi di berbagai negara.

Dapat dimengerti bahwa ada 'keragaman' dalam derajat desentralisasi di seluruh dunia tetapi yang menjadi perhatian di sini adalah bahwa ada 'perbedaan' dalam pengukurannya. Faktanya, bagaimana desentralisasi diukur sebagian bergantung pada bagaimana desentralisasi didefinisikan. Tidak ada konsensus tentang definisi yang tepat dari desentralisasi yang meningkatkan kemungkinan penggunaan ukuran desentralisasi yang bersaing. Dampak desentralisasi bergantung pada kasus tertentu dan kita harus melihat ke dalam berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku orang-orang yang



terlibat dalam pembuatan kebijakan publik dan penyediaan layanan.

Boadway & Eyraud (2018) telah menunjukkan dalam penelitian mereka bahwa tingkat desentralisasi (yang diukur dengan pangsa pemerintah daerah dalam pengeluaran dan pendapatan pemerintah secara umum) sangat bervariasi di seluruh negara. Mereka juga telah menunjukkan bahwa derajat desentralisasi tidak selalu didorong oleh struktur federal dan tidak selalu dibatasi oleh struktur kelembagaan kesatuan. Dalam studi mereka, mereka menemukan bahwa beberapa negara kesatuan (Denmark dan Swedia) lebih terdesentralisasi daripada negara yang diidentifikasi sebagai federal (Jerman, Meksiko dan Amerika Serikat).

Meskipun keragaman dalam derajat desentralisasi di seluruh dunia adalah fakta, namun ketika literatur desentralisasi dilihat lebih dekat, terlihat bahwa tidak ada konsensus tentang definisi dan ukuran desentralisasi. "Menyederhanakan sindrom karakteristik ke dalam satu dimensi otonomi menjadi lebih rumit ketika kita mempertimbangkan aspek lain dari desentralisasi pada saat yang bersamaan. Misalnya, tingkat otonomi menjadi tidak jelas ketika kita membandingkan pemerintah daerah dengan sumber daya yang signifikan (desentralisasi fiskal) dan kewenangan dekonsentrasi (sentralisasi administratif) dengan kewenangan daerah dengan sedikit sumber daya (sentralisasi fiskal) tetapi kewenangan yang dilimpahkan (desentralisasi administratif). Pengukuran yang benar dari otonomi membutuhkan pertimbangan hubungan antar dimensi "(Schneider 2003).

Di Indonesia juga, desentralisasi telah menjadi tema utama selama dua dekade terakhir Tujuan desentralisasi ditampilkan secara menonjol dalam rencana pembangunan tahunan ke-5 (1989 ± 94) dan disajikan kembali dalam rencana keenam. Sampai saat ini, hal ini jarang melampaui retorika, tetapi sekarang ada tanda-tanda sesuatu yang sedikit lebih substantif. Salah satu contohnya adalah pencanangan program desentralisasi 'daerah percontohan' baru-baru ini (Kusuma, 2016).

Vol.14 No.2 September 2019

Menurut Vito Tanzi, Indonesia adalah contoh sukses desentralisasi, terutama karena prosesnya bertahap dan direncanakan dengan hati-hati. Secara bertahap hampir tidak terlihat, beberapa orang mungkin mengatakannya tetapi apakah itu berhasil adalah masalah lain. Tidaklah mengherankan jika desentralisasi menjadi isu di Indonesia (Simanjuntak, 2015). Dengan populasi terbesar keempat di dunia, sejumlah besar pulau-pulau terpisah, dan keanekaragaman etnis dan budaya yang besar, beberapa sistem pemerintahan lokal sangat penting. Secara sepintas lalu, Indonesia tampaknya menjadi calon yang jelas untuk struktur federal, seperti tetangganya Malaysia. Namun, upaya rezim kolonial Belanda yang pergi untuk menerapkan sistem federal di Indonesia bertahan kurang dari satu tahun dan meninggalkan ketidaksukaan yang abadi di Indonesia untuk hal itu. Menurut Irawanto dkk ini bukan hanya karena negara-negara federasi dipandang sebagai boneka rezim kolonial, tetapi juga karena model seperti itu tidak sesuai dengan persepsi orang Indonesia, atau lebih tepatnya Jawa, tentang sifat kesatuan kekuasaan dan otoritas (Irawanto dkk, 1972).

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba menggambarkan derajat dan desain desentralisasi yang di gunakan oleh beberapa negara di dunia untuk mendapatkan definisi dan ukuran desentralisasi yang jelas sehingga dapat di ukur dan didapatkan negara-negara yang memang benar-benar menetapkan sistem desentralisasi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian kualitatif. Menurut Creswell: "penelitian kualitatif adalah metode untuk menggali dan memahami makna yang menurut beberapa individu atau kelompok orang berasal dari masalah sosial atau manusia." Masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah masalah sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui bagaimana cara menemukan, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penelitian. Penelitian kualitatif

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, seperti menggunakan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola yang jelas (Creswell, 2016).

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini dilakukan melalui proses menemukan, memahami, menjelaskan, dan memperoleh gambaran tentang fenomena terkait masalah derajat dan ukuran desentralisasi yang ideal di dunia.

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif tidak menggunakan perhitungan atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. (Azwar, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keandalan dan kegunaan indikator desentralisasi yang disukai sebagai ukuran gabungan dari otoritas desentralisasi menjadi pertanyaan ketika temuan dari dua studi mengenai sejauh mana desentralisasi di negara tertentu bertentangan satu sama lain atau hasil menantang akal sehat. Denmark, di mana pemerintah pusat secara ketat mengatur hampir setiap aspek keuangan pemerintah daerah terlihat lebih terdesentralisasi daripada Amerika Serikat.

Kwon (2013), menjelaskan “Agak mengejutkan bahwa AS tampak lebih terpusat daripada negara federal lainnya yang dipelajari. Pandangan pertama ini, bagaimanapun, agak menipu. Pendapatan pajak negara bagian dan lokal di AS semuanya merupakan pendapatan "sumber sendiri"; artinya, pemerintah negara bagian dan lokal mengandalkan kekuasaan perpajakan mereka sendiri untuk meningkatkan pendapatan pajak mereka. Untuk negara-negara lain, sebagian besar dari bagian pajak daerah / negara bagian merupakan hasil dari keputusan konstitusional atau legislatif yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membagi pendapatan pajak nasional”.

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

Dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya struktur dasar hubungan fiskal antar pemerintah dan lebih khusus lagi bagaimana tingkat daerah dibiayai yang merupakan ukuran nyata dari kualitas desentralisasi. Secara umum dijunjung tinggi bahwa pemerintah daerah dapat dikatakan berdaulat fiskal hanya jika mereka bergantung pada pajak daerah independen. Sebaliknya, Kahkonen & Lanyi (2001), kurang mementingkan devolusi kekuasaan perpajakan. Dalam pandangan penulis, “Bentuk desentralisasi yang paling masuk akal terutama mendelegasikan pengeluaran daripada pajak (menggunakan transfer fiskal yang transparan dan berdasarkan formula) karena devolusi kekuasaan ke pajak dapat menciptakan eksternalitas vertikal dalam hal tarif pajak yang terlalu tinggi.” Bardhan (2002), juga berpendapat bahwa dalam bidang pendapatan, apakah negara meningkatkan sebagian besar pendapatannya sendiri kurang penting dibandingkan apakah transfer ke negara bagian tidak bersifat diskresioner.

Faktanya, berdasarkan 'instrumen desentralisasi', ada dua alur dalam literatur yang mengemukakan dua pendekatan berbeda untuk mengukur otonomi fiskal. Yang satu memberi bobot lebih pada devolusi otoritas pajak sebagai instrumen desentralisasi dan menganggapnya penting untuk otonomi daerah, yang lain memberi bobot lebih pada sifat transfer antar pemerintah (diskresioner atau tidak) sebagai instrumen yang berdampak pada perilaku daerah dan mempengaruhi otonomi dan akuntabilitas.

Jadi yang pertama memilih untuk fokus pada kebijakan fiskal yaitu, hubungan antara pengeluaran dan pendapatan yang dialokasikan (ketidakseimbangan vertikal) sementara yang kedua memperhatikan mekanisme peraturan atau keuangan yaitu sifat transfer antar pemerintah (Davoodi, 1997). Dari dua pendekatan ini, dapat diamati, bahwa dalam pengukuran desentralisasi fiskal, 'bagian dari pengeluaran dan pendapatan daerah' dianggap sebagai indikator terbaik. Ini karena instrumen fiskal lebih mudah untuk diukur sementara instrumen regulasi dan keuangan sangat kompleks dan sulit untuk diukur secara



statistik karena tidak ada transfer yang dibatasi secara ketat pada tujuan teknis. Transfer mengejar campuran tujuan dan transfer bermotivasi politik tetap menjadi bagian penting dari hubungan antar pemerintah di seluruh dunia dan terlebih lagi, seperti yang dikatakan Riutort & Cabarcas (2006), bahwa upaya untuk menghilangkannya hanya menunjukkan ketahanannya. Menurut Schneider (2003), "Pendapatan dan pengeluaran menawarkan ukuran-ukuran terbaik yang tersedia tanpa studi rinci dari masing-masing dan setiap negara. Kedua, kesalahan tidak mungkin berkorelasi dengan variabel lain yang menarik sehingga mereka tidak menimbulkan bias dalam estimasi".

Bardhan (2002), menggunakan definisi klasik desentralisasi yang menurutnya desentralisasi dapat didefinisikan sebagai "sejauh mana kekuasaan dipegang oleh pemerintah daerah terpilih yang otonom yang mampu mengambil keputusan yang mengikat setidaknya di beberapa bidang kebijakan". Berdasarkan definisi ini, penulis mengidentifikasi empat variabel untuk mengukur sejauh mana desentralisasi yang mereka gunakan untuk menentukan peringkat delapan negara Amerika Latin menurut derajat desentralisasi mereka. Empat variabel tersebut adalah: (a) Otonomi Pemilu (b) Kemandirian organisasi partai daerah (c) Porsi daerah dari total pengeluaran dan (d) Tanggung jawab fungsional di sektor-sektor utama.

Dengan demikian, ada alasan untuk percaya bahwa dalam studi yang berbeda desentralisasi didefinisikan dan diukur secara berbeda dan perbedaan ini mungkin menjelaskan perbedaan yang luas dalam literatur empiris atas pertanyaan seperti negara mana yang lebih terdesentralisasi (dua studi menggunakan indikator dan metode pengukuran yang berbeda, sampai pada hasil yang berbeda). Martinez-Vazquez dkk (2017), saat mendiskusikan ukuran-ukuran yang bersaing dalam desentralisasi dalam satu kasus mengamati bahwa desentralisasi secara mengejutkan sulit untuk diukur dan kemungkinan penggunaan ukuran-ukuran desentralisasi fiskal yang bersaing membuat hasil

estimasi menjadi sangat rapuh. Mereka mempelajari kerapuhan hasil estimasi bergantung pada bagaimana seseorang mengukur desentralisasi fiskal (dan, oleh karena itu, bahaya dalam menarik kesimpulan yang luas) yang seringkali memiliki implikasi kebijakan yang penting.

Hessling (2014), juga menekankan bahwa tidak ada makna yang tepat untuk desentralisasi. Meskipun kita dapat mengamati bahwa penulis yang berbeda yang mengerjakan desentralisasi sebenarnya berbicara tentang ide yang secara luas serupa, tetapi mereka menggunakan label yang berbeda dengan cara yang sangat berbeda yang menghasilkan interpretasi berbeda dari kesimpulan yang diambil dari studi empiris. Menurut Ribot (2003), desentralisasi adalah istilah umum untuk "transfer kekuasaan dan sumber daya dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah dalam sistem politik". Desentralisasi menurut penulis, dapat mengambil tiga bentuk. "Bentuk-bentuk ini dapat berdiri sendiri atau bekerja sama: • Dekonsentrasi, atau desentralisasi administratif, terjadi ketika agen-agen di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi pindah ke tingkat yang lebih rendah. • Desentralisasi fiskal terjadi ketika tingkat pemerintahan yang lebih tinggi menyerahkan pengaruh atas anggaran dan keputusan keuangan ke tingkat yang lebih rendah. • Devolusi, atau desentralisasi demokratis, terjadi ketika sumber daya, kekuasaan, dan seringkali tugas dialihkan ke otoritas tingkat rendah yang agak independen dari otoritas yang lebih tinggi, dan yang setidaknya agak demokratis".

Jadi menurut penulis desentralisasi adalah istilah payung untuk semua metode desentralisasi yang berbeda digunakan untuk tujuan yang berbeda. Smith (2004) bagaimanapun, menganggap devolusi sebagai istilah umum yang "mencakup semua bentuk pengalihan tanggung jawab". Faktanya, ada banyak literatur tentang arti dan tipe desentralisasi yang berbeda. Mengutip yang paling penting; Smoke (2006) telah mengidentifikasi empat tipologi populer dari desentralisasi: devolusi, delegasi, dekonsentrasi, dan divestasi (atau privatisasi).



Dekonsentrasi terjadi ketika pemerintah pusat membagi tanggung jawab atas layanan tertentu ke kantor cabang daerahnya. Ini tidak melibatkan pengalihan kewenangan apa pun ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah dan kemungkinan besar tidak mengarah pada potensi manfaat atau perangkap desentralisasi. Delegasi mengacu pada situasi di mana pemerintah pusat menyerahkan tanggung jawab pengambilan keputusan dan penyelenggaraan fungsi publik kepada pemerintah daerah atau organisasi semi-otonom (pemerintah daerah tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat tetapi pada akhirnya bertanggung jawab kepadanya). Devolusi mengacu pada situasi di mana pemerintah pusat mengalihkan kewenangan pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen ke unit kuasi-otonom pemerintah daerah. Divestasi adalah pengalihan layanan dan lembaga publik ke perusahaan dan perusahaan swasta.

Jadi jelaslah bahwa desentralisasi adalah masalah yang kompleks dan beraneka segi. Ia memiliki banyak corak tergantung pada bagaimana berbagai jenis desentralisasi bercampur satu sama lain dalam konteks tertentu. Dengan demikian tidak ada satu jenis yang dapat dipelajari secara terpisah. Misalnya, desentralisasi fiskal tidak dapat dianalisis tanpa memperhitungkan warna atau varian mana yang akan kami coba selidiki tergantung pada bagaimana ia bercampur dengan jenis desentralisasi lain seperti desentralisasi politik, administrasi dan pasar dalam budaya sejarah-budaya tertentu. konteks -institusional. Oleh karena itu, penilaian yang benar tentang tingkat desentralisasi di suatu negara hanya dapat dilakukan jika pendekatan komprehensif untuk mengukur desentralisasi diadopsi (Rees & Hossain, 2010).

Karena terdapat keragaman yang luas dalam studi tentang tingkat desentralisasi, begitu pula dengan literatur tentang hasil desentralisasi. Terlihat bahwa keuntungan positif yang secara konvensional melekat pada desentralisasi (efisiensi, transparansi, akuntabilitas) tidak selalu berbanding lurus dengan derajat desentralisasi

(yaitu, dengan lebih banyak desentralisasi, lebih banyak manfaat tidak selalu datang). Terkadang hasil negatif dikaitkan dengan desentralisasi. Secara umum dikatakan bahwa desentralisasi pemerintahan dalam hal devolusi, dapat meningkatkan pemerintahan dengan mendorong akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi. Tetapi devolusi itu sendiri tidak menjamin pemerintahan yang lebih baik. Memang, devolusi yang tidak efektif atau tidak tepat menciptakan lebih banyak masalah daripada penyelesaiannya (Smoke, 2006). Oleh karena itu, penting bahwa upaya desentralisasi dibuat dengan hati-hati dengan mengingat bahwa masalah yang mengakar dalam sistem berdasarkan adanya warisan sentralisasi yang dapat merusak hasil yang diinginkan dari proses desentralisasi. Warisan sentralisasi (seperti paternalisme, klientelisme, kekakuan kelembagaan, asimetri informasi dan intervensi yang digerakkan oleh pasokan) sering kali menghambat realisasi tujuan inti desentralisasi dan oleh karena itu harus ditangani terlebih dahulu untuk memastikan lembaga lokal yang efektif.

Selain warisan sentralisasi, ada beberapa keadaan lain di mana desentralisasi tidak hanya gagal memberikan hasil yang diinginkan tetapi juga dapat menurunkan kualitas pemerintahan. Misalnya, di negara bagian yang sangat kecil, desentralisasi dan pembentukan entitas lokal otonom dapat menyebabkan hilangnya skala ekonomi dan dapat menyebabkan ketidakstabilan makroekonomi. Selain itu, desentralisasi fiskal dapat menguras pendapatan pusat ketika pemerintah pusat tidak dapat mengatur pengeluaran publik. Pemerintah daerah mungkin juga kekurangan kapasitas dan keahlian yang ada di lembaga nasional. Tantangan-tantangan ini memperkuat pentingnya perencanaan dan desain yang efektif dalam menjalankan desentralisasi (Rees & Hossain, 2010).

Terlepas dari kebingungan yang ditimbulkan dari definisi desentralisasi, kontribusi utamanya adalah bahwa ia merobek mitos desentralisasi sebagai obat universal untuk penyakit pemerintahan dan menunjukkan bahwa ia memang memiliki potensi kerugian (dalam



kondisi tertentu) dan penilaian nilai yang jelas dari desentralisasi sendiri tidak mungkin dibuat.

Jadi jelas bahwa upaya untuk mengevaluasi dampak desentralisasi sebagian besar masih belum meyakinkan. Meskipun semua karya di atas memiliki bukti di pihak mereka untuk mendukung argumen masing-masing namun disadari bahwa sebagian besar dari mereka menggunakan Statistik Keuangan Pemerintah (SKU) dari Dana Moneter Internasional untuk mengukur desentralisasi yang 'sayangnya, tidak menyertakan informasi tentang tingkat otonomi pemerintah daerah dalam hal pendapatan atau pengeluaran mereka, yang merupakan 'informasi penting ketika menganalisis desentralisasi' (Yilmaz dkk, 2004).

Terlepas dari pengamatan di atas, sebagai kelanjutan dari perhatian mengenai definisi dan pengukuran desentralisasi (seperti yang dikemukakan di bagian sebelumnya), tidak dapat diasumsikan bahwa apapun keragaman dan ketidakkesimpulan yang ada bukan hanya karena kurangnya kesepakatan tentang ukuran yang akurat dari desentralisasi. dan perbedaan yang dihasilkan dalam pemilihan dan interpretasi data. Ini juga karena mengabaikan dan mengabaikan banyak 'faktor perantara' penting lainnya. Oleh karena itu, pertanyaannya bukanlah pada keakuratan tetapi yang lebih penting adalah kecukupan indikator desentralisasi dalam konteks tertentu.

Jadi, survei literatur juga merupakan petunjuk untuk menyelidiki faktor-faktor yang memediasi proses desentralisasi untuk menghasilkan hasil yang berbeda. Argumen yang dominan sekarang adalah bahwa hasil dari desentralisasi fiskal bervariasi karena dapat muncul dalam berbagai bentuk dan kombinasi (seperti yang disebutkan di bagian sebelumnya) lintas negara, di dalam negara dan bahkan dalam sektor yang membuat penilaian derajatnya sendiri menjadi tugas yang berat di posisi pertama. Namun mengambil langkah lebih jauh, dapat dikatakan bahwa bahkan jika seseorang mengasumsikan dua kasus hipotetis dengan desain desentralisasi yang persis sama, hasilnya masih dapat diharapkan berbeda karena

"instrumen yang berbeda mungkin memiliki efek yang sangat berbeda dalam keadaan yang berbeda" (Utomo dkk, 2009). Hal ini karena kerangka hukum dan ketatanegaraan, serta struktur kelembagaan sistem administrasi publik di masing-masing negara berpengaruh terhadap hasil penerapan desentralisasi fiskal. Faktanya, implementasi yang berhasil secara umum diakui sebagai fungsi dari institusi yang ada (apakah mereka memberikan insentif politik dan ekonomi kepada pejabat publik daerah untuk tata kelola yang lebih baik dan implementasi yang lebih baik dari desentralisasi fiskal atau tidak).

Dengan demikian, hasil dari desentralisasi fiskal di negara federal atau kesatuan akan bergantung pada jenis varian apa yang dikejar dengan tujuan apa, dalam kondisi politik apa, struktur hukum dan konstitusional, proses politik, fitur lembaga politik, politik struktur keputusan dan sistem administrasi publik serta struktur insentif politik dan ekonomi. Neyapti (2006), telah menunjukkan dalam studi mereka bahwa desentralisasi akan membawa keuntungan yang secara konvensional melekat padanya jika ada pusat yang kuat tetapi dalam kasus pusat yang lemah, negara akan dihadapkan dengan semua masalah potensial yang diidentifikasi dengan desentralisasi. Studi empiris tentang hasil desentralisasi fiskal di Brazil, misalnya, studi Eaton & Dickovick (2004), menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal yang lebih besar di Brazil telah mengakibatkan krisis anggaran dan keuangan. Literatur akademis di Brasil telah menjelaskan alasan untuk hal ini dengan menyatakan bahwa lembaga politik demokratis Brasil - termasuk aturan pemilu, sistem partai politik, federalisme, dan aturan prosedur legislatif - tidak optimal dari sudut pandang keterwakilan demokratis dan efektivitas pembuatan kebijakan. Semua sub optimalitas ini berkontribusi pada kekuatan sentrifugal dan beberapa poin veto, yang pada gilirannya menyiratkan ketidakefektifan dan ketidakteraturan kelembagaan Dalam konteks ini, penting untuk menyebutkan apa yang Whitford (2002), coba tunjukkan. Mereka berpendapat bahwa efek desentralisasi sangat bergantung pada



dua aspek sentralisasi politik: (a) Kekuatan sistem partai nasional (diukur dengan fraksionalisasi parlemen dan usia partai utama) dan (b) subordinasi (apakah pejabat lokal dan negara bagian diangkat atau terpilih). Penulis mendukung teori Riker (1964) di negara berkembang, bahwa pihak yang kuat meningkatkan secara signifikan hasil desentralisasi fiskal dalam hal pertumbuhan ekonomi, kualitas pemerintahan dan penyediaan barang publik. Penulis menegaskan bahwa subordinasi pemerintah daerah ke tingkat yang lebih tinggi meningkatkan efek desentralisasi pada pertumbuhan (baik di negara maju maupun negara berkembang) dan kualitas pemerintah (di negara berkembang).

PENUTUP

Kesimpulan

Literatur yang ditinjau di atas dalam konteks derajat, desain dan hasil desentralisasi menunjukkan bahwa desentralisasi telah didekati oleh berbagai tradisi intelektual dengan sedikit kesepakatan. Mengutip Auron Schneider (2003) “Perbedaan jenis dan derajat desentralisasi telah menghasilkan kekacauan konseptual. Kekacauan telah memperbanyak konseptualisasi desentralisasi, memberinya nilai normatif positif, menggabungkannya dengan konsep lain dan mengabaikan multidimensinya. Ada juga ledakan unit analisis dalam mempelajari konsep ini”.

Jadi, mencapai definisi yang tepat dari desentralisasi dan mengaitkannya dengan hasil tertentu tidak mungkin atau tidak diinginkan karena alasan sederhana bahwa generalisasi dalam bentuk apa pun dapat menciptakan perangkat yang dapat mengaburkan daripada mengklarifikasi fakta. Yang lebih penting adalah perlunya pendekatan yang benar-benar kontekstual namun komprehensif sementara melampaui langkah-langkah tumpul seperti desentralisasi pengeluaran dan juga mempertimbangkan pengaturan politik dan kelembagaan dari kasus spesifik yang sedang diselidiki. Oleh karena itu, analisis dampak desentralisasi pada indikator makro memerlukan teknik kualitatif dan kuantitatif yang

mempertimbangkan struktur kelembagaan negara. Harus disadari bahwa jika data yang lebih halus sulit dikumpulkan (alasan umum) maka data yang lebih bulat sulit untuk diandalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Martinez-Vazquez, J., Lago-Peñas, S., & Sacchi, A. (2017). The impact of fiscal Decentralization: A survey. *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 1095-1129.
- [2] Adi, P. H. (2005). Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.*
- [3] Azwar, S. (2002). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- [4] Bardhan, P. (2002). Decentralization of governance and development. *Journal of Economic perspectives*, 16(4), 185-205.
- [5] Boadway, R., & Eyraud, L. (2018). *Designing Sound Fiscal Relations Across Government Levels in Decentralized Countries*. International Monetary Fund.
- [6] Creswell., J. W. (2016). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Edisi Indonesia, (diterjemahkan dari Qualitative Inquiry and Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [7] Davoodi, H. R. (2001). Fiscal Decentralization. *IMF Research Bulletin*, 2(2), 6.
- [8] Eaton, K., & Dickovick, J. T. (2004). The politics of re-centralization in Argentina and Brazil. *Latin American Research Review*, 90-122.
- [9] Hessling, G. (2014). Legal and institutional incentives for local environmental management. *Occasional Paper*, (17), 98-134.
- [10] Irawanto, D. W., Ramsey, P. L., & Ryan, J. C. (2011). Challenge of leading in Javanese culture. *Asian Ethnicity*, 12(2), 125-139.
- [11] Kahkonen, S., & Lanyi, A. (2001). Decentralization and governance: does decentralization improve public service delivery?.



- [12] Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, 9(1), 1-11.
- [13] Kwon, O. (2013). Fiscal decentralization: An effective tool for government reform?. *Public Administration*, 91(3), 544-560.
- [14] Neyapti, B. (2006). Revenue decentralization and income distribution. *Economics letters*, 92(3), 409-416.
- [15] Rees, C. J., & Hossain, F. (2010). Perspectives on decentralization and local governance in developing and transitional countries. *International Journal of Public Administration*, 33(12-13), 581-587.
- [16] Ribot, J. C. (2003). Democratic decentralization of natural resources. In *Beyond Structural Adjustment The Institutional Context of African Development* (pp. 159-182). Palgrave Macmillan, New York.
- [17] Riutort, M., & Cabarcas, F. (2006). Decentralization and equity: A review of the Latin America Literature. *Revista Gerencia y Politicas de Salud*, 5(11), 8-21.
- [18] Schneider Aaron. (2003). Who Gets What from Whom? The Impact of Decentralization on Tax capacity and Pro-Poor Policy. IDS Working Paper 179, Institute of Development Studies, France.
- [19] Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(2), 111-130.
- [20] Smith, D. E. (2004). Jurisdictional devolution: Towards an effective model for Indigenous community self-determination.
- [21] Smoke, P. (2006). Fiscal decentralization policy in developing countries: Bridging theory and reality. *Public sector reform in developing countries*. New York: Palgrave McMillan, 195-227.
- [22] Tanzi, V. (1996) "Fiscal Federalism and Decentralization: A Review of Some Efficiency and Macroeconomic Aspects," Annual World Bank Conference on Development Economics, 1995. World Bank, Washington, DC, 295-316
- [23] Utomo, T. W. W. (2009). Rethinking Decentralization and Deconcentration in the Unitary States. Graduate School of International Development (Slides of Presentation), Nagoya University, Japan, 1-63.
- [24] Whitford, A. B. (2002). Decentralization and political control of the bureaucracy. *Journal of Theoretical Politics*, 14(2), 167-193.
- [25] Yilmaz, S., Meloche, J. P., & Vaillancourt, F. (2004). Decentralization or Fiscal Autonomy? What Does Really Matter? Effects on Growth and Public Sector Size in European Transition Countries. The World Bank.